



Tanggap Darurat DIY Diperpanjang Sebulan

YOGYA, TRIBUN - Masa Tanggap darurat di DIY yang harusnya berakhir pada 30 Juni mendatang kembali diperpanjang sebulan ke depan. Perpanjangan masa tanggap darurat ini adalah kali kedua yang diputuskan bersama pihak Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, Forkompinda, dan unsur lainnya.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan, Kamis (25/6), menghasilkan putusan status tanggap darurat



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

SOSIALISASI - Polisi bersosialisasi penerapan prototkol kesehatan dan membagikan masker kepada pengguna jalan di Simpang Gading, Kota Yogyakarta, Kamis (25/6).

hingga 31 Juli 2020.

"Tentu perpanjangan ini bertujuan dan juga ada wacana yang mengemuka bahwa kita menilai kedisiplinan masyarakat dalam

mematuhi prototkol kesehatan perlu ditingkatkan. Fenomena beberapa waktu terakhir ini perlu ada pe-

● ke halaman 7

Tanggap Darurat

● Sambungan Hal 1

ningkatan baik pemahaman, edukasi, sosialisasi, dan patroli," ujarnya dalam jumpa pers sesuai rapat koordinasi.

Aktivitas yang terjadi di publik, lanjutnya, berdasarkan laporan dari Bidang Penegakan Hukum dan Polda serta TNI, masih banyak masyarakat yang belum menaati disiplin. "Masker, jaga jarak, itu masih belum dilakukan secara taat. Padahal saat kita membuka aktivitas ekonomi (*new normal*) harus dimbangi peningkatan disiplin. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas meningkat, dibarengi upaya protokol kesehatan meningkat," tegasnya.

Ia pun mengatakan, di satu sisi, penanganan intensif terhadap pasien Covid-19 di DIY masih harus dilakukan serta juga dampak ekonomi yang dirasakan seluruh elemen masyarakat. "Dampak ekonomi membutuhkan dukungan anggaran dan sebagainya. Dengan status tanggap darurat, dukungan itu bisa terus dilanjutkan tapi sisi lain proses membuka aktivitas ekonomi terus disiapkan," tandasnya.

Disinggung mengenai rencana pembukaan hotel dan resto serta berbagai sektor pariwisata lain menyangkut

perpanjangan masa tanggap darurat, Biwara tidak memberikan jawaban secara gamblang. "Memasuki tanggap darurat, persiapan kita lakukan. Tentu akan ada evaluasi di akhir periode ketiga ini. Nanti kita evaluasi tentu juga tidak hanya di akhir, di tengah kita evaluasi. Sejauh mana efektivitasnya, mana yang kurang, mana peningkatan untuk kemudian memasuki *new normal*," bebernya.

Biwara menambahkan ada langkah persiapan yang dilakukan semasa tanggap darurat yakni melakukan uji coba hotel dan sebagainya. "Ya nanti pada saatnya akan kita evaluasi untuk kemudian kapan kebijakan masuk *new normal*," bebernya.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih membubarkan kerumunan di tiga titik yakni Tugu Pal Putih, Titik Nol Kilometer, dan Alun-Alun Utara. "Pusatnya di Tugu, pesepeda. Itu karena yang banyak (pesepeda) enggak baca berita di media bahwa di sana ada aturan. Kita jaga di sana sampai pukul 23.30 setiap harinya. Fokus di tiga titik," urainya.

Pada perpanjangan masa tanggap darurat ini, lanjutnya, pihaknya melakukan pendataan skoring pada semua tempat usaha. Semisal restoran, hotel, tempat wisata.

"Dari tiga aspek tadi nilainya sekian, ada yang diperbaiki. Seluruh DIY harapannya bisa disasar sampai 30 hari. Misal skor hanya 60 nilai C, artinya kurang baik. Masyarakat melihat berarti protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik di sini. Sanksi sosial, bukan denda," pungkasnya.

Pemulihan

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, mengatakan bahwa dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, Pemda DIY sudah harus bekerja keras untuk memulihkan sektor perekonomian yang babak belur dihajar Covid-19. "Bagaimana program-program *recovery* (pemulihan) terutama perekonomian segera dilakukan secara masif. Saat ini dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat dan jangan sampai pemerintah terlambat mengambil tindakan. Jika kita terlambat mengambil langkah *recovery*, sangat dikhawatirkan perekonomian semakin terpuruk," bebernya. Kamis (25/6).

Politisi PKS tersebut mengatakan, pemulihan di bidang ekonomi harus dilakukan dengan cermat. Kemudian dipilih program-program ungkitan yang strategis mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemda DIY yang turun drastis.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo menjelaskan, sela-

ma ini Pemkab Sleman menggunakan tiga gedung asrama haji untuk menampung orang dalam pemantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG), dan pelaku perjalanan dari area terdampak (PPAT).

Dijelaskannya, ke depan pihaknya akan menyederhanakan penggunaan selter tersebut. Menurutnya ini sebagai bentuk efisiensi. Di asrama haji terdapat tiga gedung besar dan semuanya bisa digunakan. Namun menurutnya, kalau tingkat hunian kecil maka akan lebih baik digunakan satu gedung dulu. "Besok akan diaktifkan satu gedung, yakni gedung Musdalifah yang memiliki 58 kamar," jelasnya. Kamis (25/6).

Joko menjelaskan bahwa proses isolasi tetap memerlukan biaya. Dengan melakukan isolasi di selter tersebut maka dalam perawatan tidak memerlukan biaya mahal. "Betapa pun memerlukan biaya, walaupun tidak terlalu mahal, dibanding semua harus masuk RS," terangnya.

Sedangkan Bupati Sleman, Sri Purnomo menilai, peran selter masih sangat penting. Menurutnya, isolasi yang dilakukan pemerintah paling tepat adalah di asrama haji. "Di sana ruangan dan fasilitas memenuhi persyaratan dan dari segi pembiayaan juga terjangkau," jelasnya. (kur/hda/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005